

**Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja  
Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada  
OPD Pemerintahan Sumatera Utara**

SKRIPSI

*Diajakukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*

*Program Studi Akuntansi*



**Disusun Oleh:**

**Nama : Arinda Hasanah**

**Npm : 1705170263**

**Program Studi : Akuntansi**

**Konsentrasi : Sektor Publik**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

#### MEMUTUSKAN

Nama : ARINDA HASANAH  
NPM : 1705170263  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA DENGAN EFEKTIVITAS ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA OPD PEMERINTAHAN SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

#### Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

(MUHAMMAD FAHMI, SE, M.Si, ACC, CA, (PA))

#### Pembimbing

(M. FERZA ALPI, SE, M.Si)

#### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ARINDA HASANAH

N.P.M : 1705170263

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
TERHADAP KINERJA DENGAN EFEKTIVITAS ANGGARAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA OPD  
PEMERINTAHAN SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU



(H. ANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

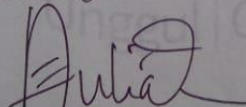
BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arinda Hasanah  
NPM : 1705170263  
Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara

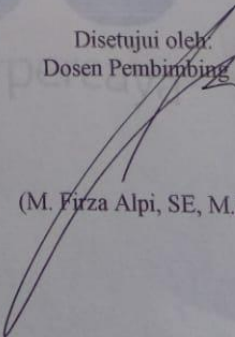
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang Masalah Identifikasi Masalah	12/10/2021	
Bab 2	Kajian Pustaka Pengenalan teori-teori	12/10/2021	
Bab 3	Metodologi	12/10/2021	
Bab 4	Hasil dan Pembahasan data	12/10/2021	
Bab 5	Kesimpulan	12/10/2021	
Daftar Pustaka	Mendely	12/10/2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai ACC	12/10/2021	

Medan, 12 Oktober 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(M. Firza Alpi, SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARINDA HASANAH  
NPM : 1705170263  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP  
KINERJA DENGAN EFEKTIVITAS ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING PADA OPD PEMERINTAHAN SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



ARINDA HASANAH

## **ABSTRAK**

**Arinda Hasanah. NPM 1705170263. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Dengan efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara, untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kauntitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, Uji asumsi klasik dan Analisis path. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan akuntabilitas terhadap kinerja OPD, 2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan transparansi terhadap kinerja OPD, 3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas anggaran, 4) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan transparansi terhadap efektivitas anggaran, 5) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan efektivitas anggaran terhadap kinerja OPD, 6) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas anggaran dengan kinerja OPD, 7) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan transparansi terhadap efektivitas anggaran dengan kinerja OPD.

**Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Anggaran, kinerja OPD**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan berkat ridho Allah SWT yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara.** Shalawat beserta salam dipersembahkan kepada suritauldan dan pembimbing kita Rasullullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan sekarang. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam proses sarjanapendidikan (S-1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan rintangan baik dari segi waktu, materi, maupun tenaga. Namun berkat usaha dan kerja keras yang diridhoi Allah SWT penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari katasempurna.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa, ayahanda HASANUDDIN dan ibunda ARIYATI yang tidak pernah putus mendoakan anaknya, yang membesarkan, menafkahi, mengajarkan banyak hal, memberikan kasih sayang yang tulus, dan juga memotivasi anaknya pada saat terpuruk. Terimakasih yang terbesar terhadap ayahanda dan ibunda tercinta. Untuk itu penulis persembahkan skripsi ini sebagai tanda terima kasih kepada ayah dan ibu.
2. Terima Kasih Kepada Bapak H. Prof. Dr. Agussani., M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Terima kasih kepada Bapak H. Januri SE., MM., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Gunawan, SE., M., Si. sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M., Si. sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .



7. Terima Kasih Kepada Bapak Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Terima kasih kepada Bapak M.Firza Alpi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih kepada Ibu Hafsa, SE., M.Si dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Penguji 1 dan Penguji 2 dalam sidang skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Terima kasih Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas MuhammdiyahSumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Terima kasih Untuk seluruh staf akademik Fakultas ekonomi dan bisnis terutama prodi Akuntansi Universitas MuhammdiyahSumatera Utara yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
12. Terima kasih Untuk teman-temanku seperjuangan stambuk 2017 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Dewi Sari Matanari, Delila, Widya, Ririn, Marina, Ella, Sara, Siska dan Sehin terima kasih telah memberikanku semangat dan selalu menghiburku.
13. Terima kasih Untuk sahabat tercinta yang selalu memberikan support di SMP dan SMA hingga detik ini yaitu Adinda, Fajar, Akbar, Nisa, Vira, Lani, Syahira, Ajeng, Babay, dan Fahmi terima kasih selalu

mengingatkan penulis untuk bersabar dan mengingatkan dalam hal kebaikan.

14. Terima kasih juga buat adik kandung saya Amanda Hannas Tasya dan Alifah Hasti Nayla yang selalu suport dan selalu berdoa untuk kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Medan, 2021  
Penulis

**ARINDA HASANAH**  
**Npm: 1705170263**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah .....	1
1.2 Identifikasi masalah .....	4
1.3 Batasan dan rumusan masalah.....	5
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1 Uraian teori .....	8
2.1.1 Kinerja OPD .....	8
2.1.3.1 Pengertian Kinerja .....	12
2.1.3.2 Indikator Kinerja .....	13
2.1.2 Akuntabilitas .....	14
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas.....	14
2.1.2.2 Prinsip- Prinsip Akuntabilitas.....	15
2.1.2.3 Jenis- jenis Akuntabilitas .....	16
2.1.3 Transparansi .....	16
2.1.3.1 Pengertian Transparansi.....	16
2.1.3.2 Prinsip- prinsip Transparansi .....	18
2.1.3.3 Manfaat Transparansi .....	18
2.1.3..4 Indikator Transparansi .....	19
2.1.4Efektivitas Anggaran .....	20
2.1.4.1 Penegertian Anggaran .....	20

2.1.4.2 Tujuan Penyusunan Anggaran .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Koseptual .....	22
2.4 Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pendekatan penelitian.....	28
3.2 Definisi operasional variabel .....	28
3.3 Tempat dan waktu penelitian .....	40
3.4 Populasi dan sampel .....	40
3.5 Teknik pengumpulan data .....	41
3.6 Teknik Analisis Data .....	42
3.7 Metode Analisis Data .....	42
3.7.1 Uji Validitas .....	42
3.7.2 Uji Reabilitas .....	43
3.7.3 Uji Normalitas .....	43
3.7.4 Uji Multikolinearitas .....	44
3.7.5 Analisis Path .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1.1 Deskripsi Data .....</b>	<b>46</b>
<b>4.2.1 Analisis Data .....</b>	<b>46</b>
4.2.1.1 Uji Validitas .....	46
4.2.1.2 Uji Reabilitas .....	49
4.2.1.3 Uji Normalitas .....	52
4.2.1.4 Uji Multikolinearitas .....	54
4.2.1.5 Uji Hipotesis .....	56
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>64</b>
4.2.1 Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja OPD .....	64

4.2.2	Transparansi berpengaruh terhadap kinerja OPD .....	64
4.2.3	Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran .....	65
4.2.4	Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran .....	65
4.2.5	Efektivitas Anggaran berpengaruh Kinerja OPD .....	66
4.2.6	Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD .....	67
4.2.7	Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD .....	67
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	29
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas item-item variabel .....	47
Tabel 4.2 Uji Reabilitas Statistik Variabel X1 .....	50
Tabel 4.3 Uji Reabilitas Statistik Variabel X2.....	51
Tabel 4.4 Uji Reabilitas Statistik Variabel Z .....	51
Tabel 4.5 Uji Reabilitas Statistik Variabel Y .....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas .....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	56
Tabel 4.10 Uji Statistik T .....	57
Tabel 4.11 Uji Statistik T .....	57
Tabel 4.12 Uji Statistik T .....	60
Tabel 4.13 Uji Model Summary .....	63
Tabel 4.14 Uji Model Summary .....	63



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual .....	26
4.1 Kerangka Model Analisis Jalur .....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota.

Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, Red) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD, Red).“Ini tindaklanjutnya misalnya saat kita membuat surat undangan kedinasan, jadi tidak mengundang SKPD lagi melainkan OPD,”

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. (Wikipedia)

Dikatakan, setidaknya terdapat 4 permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas pada pemerintah daerah provsu, yaitu

belum adanya dokumen perencanaan, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, RKA dan DPA. Secara nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan

perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019 sedangkan Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. ([sumutprov.go.id](http://sumutprov.go.id) / Berita Online)

“Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai ‘B’, tentunya nilai ini belum memenuhi ekspektasi, dimana kita masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya.

Untuk meningkatkan pencapaian nilai SAKIP, Kementerian PAN dan RB merekomendasi delapan hal, diantaranya, Pemprov Sumut, khususnya Bappeda agar melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun Renstra perangkat dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja, seperti manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, serta mekanisme penjabaran kinerja.

Selanjutnya, meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja oleh inspektorat, sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan penerapan SAKIP

secara efektif. Serta mendorong inspektorat untuk mereviu laporan kinerja Pemprov Sumut pada tahun yang akan datang.(Arief Sudarto Trinugroho/setdaprovsu).

Transparansi Pemprov Sumut akan terus mengembangkan sistem elektronifikasi transaksi. Ini harus agar kualitas pengelolaan keuangan daerah kita terus meningkat. Aplikasi yang sudah dibuat digunakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan kita,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina diwakili Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Arief Sudarto Trinugroho.

Efektivitas Anggaran Pemerintahan pada saat ini mengalami penurunan karena anggaran banyak di pakai untuk Covid 19, anggaran sebesar Rp 1,5 Triliun dari APBN 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Anggran untuk dana Covid 19 pemerintah menyiapkan dana anggaran sebanyak 3 tahap yaitu mulai dari bulan April – Juni, Juli – September, sampai Oktober – Desember. Tahap pertama disediakan dana sebesar Rp. 502,1 Miliar untuk tahap kedua dan ketiga yakni Juli – September, sampai Oktober – Desember 2020, pemprov Sumut juga memproyeksi alokasi anggaran masing – masing sebesar Rp. 500 Miliar. Sehingga untuk penanganan Covid 19 keseluruhannya mencapai Rp. 1,5 Triliun lebih dari hasil refocusing APBD 2020. Sebagaimana disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumnya di indonesia sebesar 5,2% sedangkan saat ini turun menjadi 0,5%. Efektivitas anggaran disebut sebagai variabel intervening karena anggaran pada

tahun ini menurun begitu drastis dan tidak efektif untuk anggaran tahun ini.  
(sumutprov.go.id)

Kineja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemimpin harus memiliki ilmu, wawasan dan pemahaman yang cukup di bidang substansi yang di pimpinnya. Seluruh Kepala OPD diharapkan menindaklanjuti perjanjian kinerja yang sudah dibuat. Sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumut dengan sebaik - baiknya, serta transparan dalam pengambilan kebijakan sehingga kemudian melahirkan kepercayaan publik kepada pemerintah. (Bisnis.com)

Saat ini ada 10 OPD yang dijadikan sampel untuk peningkatan akuntabilitas kinerja yaitu Bappedda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. (Bisnis.com)

## **2.1 Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat Akuntabilitas dan Transparansi pada saat ini menjadi penyebab permasalahan.
2. Kinerja OPD Pemerintahan harus memiliki ilmu dan wawasan untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik.

3. Efektivitas anggaran yang menjadi variabel intervening memiliki masalah dalam anggaran tahun ini makin menurun.

### **3.1 Batasan dan rumusan masalah**

#### 1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tidak semua OPD yang di teliti hanya sebagian dari organisasi perangkat daerah yang bisa di teliti oleh peneliti yaitu pada bagian lembaga teknis daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda Provsu).

#### 2. Rumusan Masalah

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara ?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran ?
4. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran ?
5. Apakah Efektivitas Anggaran berpengaruh Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara?
6. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara Sebagai Variabel Intervening?
7. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara Sebagai Variabel Intervening?



#### **4.1 Tujuan dan manfaat penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara ?
- 2) Untuk menganalisis Transparansi berpengaruh terhadap kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara?
- 3) Untuk menganalisis Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran ?
- 4) Untuk menganalisis Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran ?
- 5) Untuk menganalisis Efektivitas Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara ?
- 6) Untuk menganalisis Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara ?
- 7) Untuk menganalisis Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara?

##### 1. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian – penelitian selanjutnya terkait dengan kinerja pemerintahan.
- 2) Manfaat bagi pemerintahan dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparansi dalam mengelola keuangan demi meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

- 3) Manfaat bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tanggungjawab dan keterbukaan segala informasi pengelolaan keuangan dari pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian teori**

##### **2.1.1 Kinerja OPD**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari :

#### **A. SEKRETARIAT DAERAH**

1. Biro Administrasi Pimpinan
2. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Biro Hukum
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
6. Biro Umum
7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

#### **B. SEKRETARIAT DPRD**

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

#### **C. DINAS DAERAH**

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Dinas Ketahanan Pangan
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
10. Dinas Pertanian
11. Dinas Kelautan dan Perikanan
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Dinas Pariwisata
19. Dinas Sosial
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**D. LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

1. Inspektorat
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Pendapatan Daerah

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Penghubung

**E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

1. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)

**F. LEMBAGA LAINNYA**

1. Rumah Sakit Umum Daerah
2. Rumah Sakit Umum Malimping

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala

Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta

mengoorDinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.



Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah.

Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah dengan kurang lebih dari 40 (empat puluh) terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas paling banyak 12 (dua belas); dan
- d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 8 (delapan).

#### **2.1.1.2 Pengertian Kinerja**

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67). “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003: 223) “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”.

Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Menurut John Whitmore (1997: 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan”.

Menurut Veizal Rivai ( 2004: 309) mengemukakan kinerja adalah: “ merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.

### **2.1.1.3 Indikator Kinerja**

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins, 2006:260) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kuantitas Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Ketepatan waktu Merupakan tingkat aktivitas

diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Efektivitas Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Kemandirian Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

## **2.1.2 Akuntabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau individu terhadap apa yang telah dilakukannya. Amelia (2015) mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban kepada publik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap publik terutama dalam hal penerapan transparansi laporan keuangan.

Menurut Mursyidi (2013), akuntansi adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Sedarmayanti (2003), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

#### **2.1.2.2 Prinsip- Prinsip Akuntabilitas**

Menurut LAN dan BPKP (2000), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan

manfaat yang diperoleh.

- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### **2.1.2.3 Jenis- jenis Akuntabilitas**

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability). Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.
- 2) Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

## **2.1.3 Transparansi**

### **2.1.3.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus.

At

uran dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri

Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Hafiz (2000), transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.3.2 Prinsip- prinsip Transparansi**

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu: Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Laporan tahunan. Website atau media publikasi organisasi. Pedoman dalam penyebaran informasi.

#### **2.1.3.3 Manfaat Transparansi**

Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.

3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

#### **2.1.3.4 Indikator Transparansi**

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu:

1. Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan izin usaha) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.
2. Indikator kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straight



forward and easy to apply” dan mudah dipahami oleh pengguna.

3. Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely and readily available).
4. Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
5. Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
6. Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

#### **2.1.4 Efektivitas Anggaran**

##### **2.1.4.1 Penegertian Anggaran**

Menurut Munandar (2001:3) adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik.

Menurut Nafarin (2007:11) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.” Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu

tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

#### **2.1.4.2 Tujuan Penyusunan Anggaran**

Menurut Ellen et.al. (2001:4) tujuan penyusunan anggaran adalah :

1. Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

penelitian terdahulu pernah di lakukan pada penelitian sekarang , pada waktu, tempat dan daerah yang berbeda Penelitian terdahulu tentang pengaruh

Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap kinerja dengan Efektivitas Anggaran sebagai variabel Intervening pada OPD Pemerintahan Kabupaten Magetan dan Ngawi. Variabel terdahulu memiliki 3 variabel yaitu Variabel X (X1 Akuntabilitas X2 Transparansi X3 Pengawasan) (Variabel Z Efektivitas Anggaran) dan (Variabel Y Kinerja OPD). Tempat penelitian terdahulu Kabupaten Magetan dan Ngawi pada tahun 2019. Sedangkan judul penelitian sekarang tentang pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja dengan Efektivitas Anggaran sebagai Variabel Intervening pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara, Variabel penelitian sekarang memiliki 3 Variabel yaitu Variabel X (X1 Akuntabilitas X2 Transparansi), (Variabel Z Efektivitas Anggaran) dan (Variabel Y Kinerja OPD). Tempat penelitian sekarang Pemerintahan Sumatera Utara pada tahun 2021.

### **2.3 Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah untuk penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang harus diteliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja dengan efektivitas anggaran sebagai variabel intervening opd pemerintahan kota medan. Dalam penelitian ini ada variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan variabel intervening (Z). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu (X1) Akuntabilitas (X2) Transparansi dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu (Y) Kinerja dengan variabel intervening yaitu (Z) Efektivitas Anggaran.

Hasil penelitian Setiyawan dan Safri (2016); Premananda dan Latrini (2017); Putra, Erlina dan Sari (2016); Wandari, Sujana dan Putra (2015) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja OPD pada Pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah.  $H_1$  : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara.

Hasil penelitian Setiyawan dan Safri (2016); Premananda dan Latrini (2017); Cimpoeru dan Cimpoeru (2015); Wandari, Sujana dan Putra (2015); Putra, Erlina dan Sari (2016) yang menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja OPD pada instansi pemerintah. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa transparansi berperan sangat penting dalam mempengaruhi kinerja OPD. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah.  $H_2$  : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara.

Hasil penelitian Paramitha dan Gayatri (2016); Egbide dan Agbude (2016); Nalareason, Atmadja dan Adiputra (2014); Pertiwi (2015); Meutia dan Fitriana (2011); Hadyrianto dan Muljo (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap efektivitas anggaran pada instansi pemerintah. Akuntabilitas menjadi prinsip terbentuknya tatanan pemerintah yang baik. Adanya tanggungjawab tersebut, pemerintah akan mampu menjawab kritik dari publik terhadap anggarannya. Jadi apabila akuntabilitas terus ditingkatkan, hal itu mendorong semakin meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran. Berdasarkan

uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah.  $H_3$  : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran

Hasil penelitian Setiyawan dan Safri (2016); Egbide dan Agbude (2016); Octariani, Akram dan Animah (2017); Vian dan Bicknell (2013); Adiwirya dan Sudana (2015); Hadyrianto dan Muljo (2012); Pertiwi (2015) menunjukkan hasil bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas anggaran. Transparansi menjadi prinsip terbentuknya tatanan pemerintah yang baik. Adanya transparansi pemerintah akan mampu menjawab berbagai keluhan dari masyarakat terhadap anggarannya. Jadi apabila transparansi terus ditingkatkan, hal itu akan mendorong semakin meningkatnya efektivitas anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah.  $H_4$  : Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran

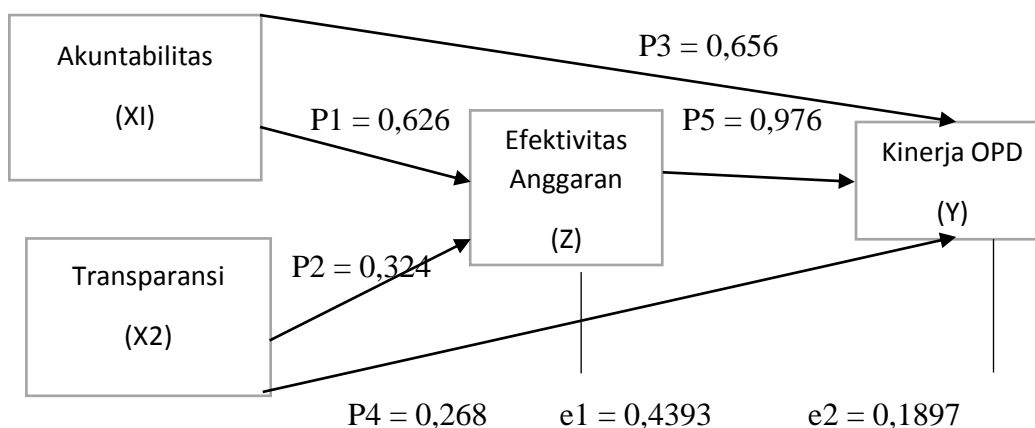
Penelitian Magno, Hakim dan Domai (2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan hubungan pengelolaan anggaran dengan kinerja organisasi pemerintah daerah. Menurut penelitian tersebut semakin tinggi efektivitas anggaran maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Penelitian Fathoni (2013) dan Syahrída (2011) menunjukkan hasil bahwa anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.  $H_5$  : Efektivitas Anggaran berpengaruh Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara.

Hasil penelitian Paramitha dan Gayatri (2016); Egbide dan Agbude (2016); Nalareason, Atmadja dan Adiputra (2014); Pertiwi (2015); Meutia dan Fitriana

(2011); Hadyrianto dan Muljo (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap efektivitas anggaran pada instansi pemerintah. Akuntabilitas menjadi prinsip terbentuknya tatanan pemerintah yang baik. Adanya tanggungjawab tersebut, pemerintah akan mampu menjawab kritik dari publik terhadap anggarannya. Jadi apabila akuntabilitas terus ditingkatkan, hal itu mendorong semakin meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran, Penelitian tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja OPD pada Pemerintah. H6: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian Setiyawan dan Safri (2016); Egbide dan Agbude (2016); Octariani, Akram dan Animah (2017); Vian dan Bicknell (2013); Adiwirya dan Sudana (2015); Hadyrianto dan Muljo (2012); Pertiwi (2015) menunjukkan hasil bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas anggaran. Transparansi menjadi prinsip terbentuknya tatanan pemerintah yang baik. Adanya transparansi pemerintah akan mampu menjawab berbagai keluhan dari masyarakat terhadap anggarannya. Jadi apabila transparansi terus ditingkatkan, hal itu akan mendorong semakin meningkatnya efektivitas anggaran dan Hasil penelitian Setiyawan dan Safri (2016); Premananda dan Latrini (2017); Cimpoeru dan Cimpoeru (2015); Wandari, Sujana dan Putra (2015); Putra, Erlina dan Sari (2016) yang menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja OPD pada instansi pemerintah. H7: Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara sebagai variabel intervening.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah hasil sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera

Utara

H<sub>2</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera

Utara

H<sub>3</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran

H<sub>4</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran

H<sub>5</sub>: Efektivitas Anggaran berpengaruh Kinerja OPD Pemerintahan

Sumatera Utara

H<sub>6</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara sebagai variabel intervening

H<sub>7</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara sebagai variabel intervening.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah survei karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menguji atau membuktikan suatu teori atau hipotesis untuk memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei, yaitu suatu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Penelitian ini mengembangkan teori-teori dan/atau hipotesis melalui pertanyaan tertulis yang diberikan kepada sampel dari populasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Sumatera Utara.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Pada penelitian ini terdapat tiga jenis variabel yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel intervening. Definisi operasional variabel penelitian terdalu yaitu Suci Muthi'ah dengan judul "pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja dengan efektivitas anggaran sebagai variabel intervening pada OPD pemerintahan kabupaten magetan dan ngawi".

Tabel 3.1

## Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel/Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas (X1)	<p>Akuntabilitas merupakan salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang (Mahmudi, 2013).</p>	<p>1. Tahapan pengelolaan anggaran disetiap OPD melibatkan semua unsur dalam OPD tersebut</p> <p>2. LAKIP digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas OPD untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.</p> <p>3. OPD memiliki</p>	Skala likert

		<p>proses</p> <p>mengembangkan</p> <p>karyawan yang</p> <p>kompeten sesuai</p> <p>dengan kebijakan</p> <p>organisasinya</p> <p>4. Lakip merupakan</p> <p>perwujudan bentuk</p> <p>akuntabilitas dari</p> <p>tugas dan fungsi</p> <p>yang dipercayakan</p> <p>kepada instansi</p> <p>pemerintah.</p> <p>5. OPD</p> <p>menginformasikan</p> <p>APBD yang diterima</p> <p>kepada masyarakat</p> <p>melalui media</p> <p>elektronik.</p> <p>6. LAKIP yang</p> <p>menggambarkan</p> <p>kinerja yang di capai</p> <p>oleh suatu instansi</p>	
--	--	--	--

		<p>pemerintahan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayain APBN/APBD.</p> <p>7. Informasi anggaran yang disajikan, berisi informasi yang benar dan lengkap terkait sasaran dari suatu program.</p> <p>8. OPD memiliki ketegasaan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kerja karyawan.</p> <p>9. Laporan pertanggungjawaban di OPD dapat dengan mudah</p>	
--	--	---	--

		<p>diakses oleh masyarakat.</p> <p>10. OPD mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.</p>	
<p>Transparansi (X2)</p>	<p>Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Menurut Hafiz</p>	<p>1. APBD diumumkan dan disajikan secara tepat jumlahnya kepada masyarakat.</p> <p>2. Transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses.</p>	<p>Skala likert</p>

	(2000).	<p>3. Informasi tentang pengelolaan anggaran, mudah didapatkan oleh masyarakat.</p> <p>4. LAKIP diumumkan melalui mediaelektronik.</p> <p>5. Publik tidak bisa mengakses informasi mengenai pengelolaan anggaran.</p> <p>6. Pelayanan masyarakat harus memberikan informasi secara transparan akan tetapi sesuai dengan aturan-aturan yang</p>	
--	---------	--	--

		<p>berlaku.</p> <p>7. Pada proses penyusunan anggaran, kebijakan anggaran di OPD selalu diumumkan secara terbuka.</p> <p>8. Transparansi OPD terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.</p> <p>9. Sistem pemberian informasi di OPD dapat dan mudah diakses oleh masyarakat dengan terbuka.</p> <p>10. OPD mampu menyajikan informasi penyelenggaraan</p>	
--	--	---	--

		pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.	
Efektivitas Anggaran (Z)	Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang (Ellen Cristina)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap unit mempunyai kecakapan dalam melaksanakan kegiatan.</li> <li>2. Pengalokasian dana untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Semua program yang ditargetkan, dapat tercapai sesuai dengan visi misi.</li> <li>4. Setiap kegiatan atau aktivitas dilakukan berdasarkan rencanastrategi dan tujuan operasional</li> </ol>	Skala likert



		<p>yang telah ditetapkan.</p> <p>5. Anggaran yang dikelola berdampak kepada kepuasan pelayanan masyarakat.</p> <p>6. Program yang ditargetkan menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan.</p> <p>7. Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur</p> <p>8. Anggaran belanja di OPD yang telah tersusun secara logis yaitu adanya input, output, hasil dan capaian.</p>	
--	--	---	--

		<p>9. Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.</p> <p>10. Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur Yang berlaku.</p>	
Kinerja(Y)	<p>Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya</p>	<p>1. Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros.</p> <p>2. Setiap kegiatan, program, dan Kebijakan dilakukan evaluasi dengan</p>	Skala likert

	<p>Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67).</p>	<p>menilai efisiensi biaya.</p> <p>3. Setiap kegiatan, program, dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan telah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.</p> <p>5. OPD mempertahankan karyawan yang kompeten.</p> <p>6. OPD memiliki ketegasan mengenai tolak ukur kinerja untuk mendorong</p>	
--	---	---	--

		<p>akuntabilitas kerja karyawan</p> <p>7. OPD mampu mengidentifikasi perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.</p> <p>8. OPD memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mencerminkan wewenang untuk pencapaian tujuan organisasinya.</p> <p>9. Indikator kinerja untuk setiap kegiatan tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan teratur.</p> <p>10. Pegawai OPD</p>	
--	--	---	--

		bersikap dan berperilaku ramah/baik dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna layanan.	
--	--	--	--

### 3. 3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Sumatera Utara. Masalah yang diteliti adalah kinerja pemerintah yang dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas anggaran. Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021.

### 3. 4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (1997: 57)

Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Sugiyono (2008: 118). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2012;2016).

Jika Populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan di hadapkan nantinya seperti: keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk Populasi. Oleh karena itu sampel yang didapatkan dari Populasi memang harus benar-benar representatif (mewakili).

Disini Populasi yang di lakukan OPD Pemerintahan Samatera Utara sebanyak 320 pegawai OPD dan sampel yang di lakukan oleh penelitian ini hanya 70 pegawai OPD, dikarenakan OPD Bappeda Provsu yang bisa peneliti survei dan dapat di jangkau oleh peneliti.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei, dimana penelitian membuat daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada seluruh responden dengan teknik survei mandiri (*self administered survey*) yaitu metode pengumpulan data primer yang dalam hal ini responden diminta untuk mengisi jawaban sendiri pada kuesioner yang diberikan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu pengumpulan data menggunakan alat ukur penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat/ditetapkan, secara umum metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Terknik analisis data menggunakan software SPSS V19.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan alat analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan uji validitas data yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas serta alat analisis data yang digunakan yaitu (metode analisis jalur / path analysis). Analisis data dengan menggunakan software SPSS V19.

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan pada setiap variabel. Indikator yang digunakan dikatakan valid

apabila mempunyai nilai loading factor lebih dari 5%.

## **2. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk Ghozali (2013:47). Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ghozali (2013:48) menyatakan batas nilai yang digunakan untuk reliabilitas yang diterima adalah 0,7.

## **B. Uji Asumsi Klasik**

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bisa mengingat tidak semua data dapat diterapkan dengan regresi. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas dan uji multikolinearitas.

### **1. Uji Normalitas**

Normalitas adalah uji untuk melihat apakah data yang akan dianalisis telah berdistribusi normal dan dapat diolah lebih lanjut untuk permodelan structural equation modelling ini. Uji normalitas dilakukan pada data univariate dan data multivariate dimana beberapa variabel yang digunakan sekaligus dalam analisis terakhir. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan melihat critical ratio (CR) dari skewness value. Jika dipergunakan tingkat signifikansi 5% (0,05), maka nilai CR harus diantara -1,96 sampai dengan 1,96 ( $-1,96 \leq CR \leq 1,96$ ). Jika demikian, maka dikatakan data distribusi normal, baik secara



univariate maupun secara multivariate (Ghozali, 2013).

## 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat melalui determinan matriks kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil atau mendekati nol, maka menunjukkan indikasi terdapat masalah multikolinearitas atau singularitas, sehingga data itu tidak dapat digunakan untuk penelitian (Ghozali, 2013). Sehingga nilai determinan matriks kovarians harus menjauhi nol.

## C. Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan regresi berganda (multiple regression) karena meneliti lebih dari satu variabel independen. Persamaan linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik T mempunyai nilai signifikansi  $\alpha : 5\%$ . Kriteria pengujian hipotesis adalah jika nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value)  $< 0,005$ , maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

### b. Uji Analisis Jalur (Analisis Path)

Uji regresi dengan variabel intervening bertujuan untuk melihat pengaruh tidak langsung antara suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda,

atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal atau sebab akibat) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Analisis jalur bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dihitung dari nilai *unstandardized coefficients* regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Data**

Deskripsi data adalah upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan ataupun disajikan dengan baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data tersebut meliputi penyusunan data yang bentuk tampilannya mudah terbaca secara lengkap.

Objek penelitian yang digunakan di Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Sumatera Utara. yang beralamat di Jalan Pangeran DiPonegoro No. 21A, Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan, Sumatera Utara.

##### **4.1.2 Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis data yaitu Uji Validitas, Uji Realiabilitas., Uji asumsi klasik, pengujian hipotesis. Data yang siap diolah akan dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS 19. Untuk menguji hipotesis yang dirumuskan, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis data sebagai berikut :

###### **4.1.2.1 Uji Validitas**

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**

Hasil Uji Validitas item-item variabel

Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,851	0.235	Valid
X1.2	0,809	0.235	Valid
X1.3	0,811	0.235	Valid
X1.4	0,892	0.235	Valid
X1.5	0,930	0.235	Valid
X1.6	0,933	0.235	Valid
X1.7	0,899	0.235	Valid
X1.8	0,862	0.235	Valid
X1.9	0,486	0.235	Valid
X1.10	0,775	0.235	Valid
X2.1	0,892	0.235	Valid
X2.2	0,880	0.235	Valid
X2.3	0,835	0.235	Valid
X2.4	0,895	0.235	Valid
X2.5	0,599	0.235	Valid

X2.6	0,921	0.235	Valid
X2.7	0,913	0.235	Valid
X2.8	0,873	0.235	Valid
X2.9	0,835	0.235	Valid
X2.10	0,722	0.235	Valid
Y1	0,850	0.235	Valid
Y2	0,906	0.235	Valid
Y3	0,908	0.235	Valid
Y4	0,566	0.235	Valid
Y5	0,943	0.235	Valid
Y6	0,947	0.235	Valid
Y7	0,953	0.235	Valid
Y8	0,946	0.235	Valid
Y9	0,901	0.235	Valid
Y10	0,797	0.235	Valid
Z1	0,886	0.235	Valid
Z2	0,901	0.235	Valid
Z3	0,890	0.235	Valid

Z4	0,900	0.235	Valid
Z5	0,932	0.235	Valid
Z6	0,568	0.235	Valid
Z7	0,908	0.235	Valid
Z8	0,952	0.235	Valid
Z9	0,931	0.235	Valid
Z10	0,798	0.235	Valid

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner yang berisi dari 4 variabel ini ada 40 kuesioner yang telah diisi oleh 70 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah  $df = N-2$  jadi  $70-2 = 68$ , sehingga  $r \text{ tabel} = 0,2352$ . Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  ada 40 kuisioner yang dinyatakan valid, 40 kuesioner semua dinyatakan valid karena  $r \text{ hitung}$  lebih dari  $r \text{ tabel}$  yaitu 0,2352.

#### 4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Penelitian ini harus dilakukannya uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X1, X2, Y dan Z.

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk Ghazali (2013:47). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ghazali (2013:48) menyatakan batas nilai yang digunakan untuk reliabilitas yang diterima adalah 0,7. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,7. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari  $>0,7$  jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena  $<0,7$ . Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,785	11

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Akuntabilitas (X1) dapat dilihat bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0,785 > 0,7$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (X1) dinyatakan Reliabilitas.

**Tabel 4.3****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,786	11

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel X kedua Transparansi (X2) dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0,786 > 0,7$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (X2) dinyatakan Reliabilitas.

**Tabel 4.4****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,788	11

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Z Efektivitas Anggaran (Z) dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0,788 > 0,7$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (Z) dinyatakan Reliabilitas.



**Tabel 4.5****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,788	11

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Y Kinerja OPD (Y) dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0,788 > 0,7$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (Y) dinyatakan Reliabilitas.

**4.1.2.3 Uji Normalitas**

Pengujian pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja OPD dengan Efektivitas Anggaran sebagai variabel intervening pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian pengaruh menggunakan analisis linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi regresi linier berganda yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan cara mengukur jika nilai yang di hasilkan kurang dari 0,05 maka persebarannya dianggap tidak normal sebaliknya jika hasil yang didapat lebih dari 0,05 maka dinyatakan persebarannya normal, dan hasilnya sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) Terhadap Efektivitas Anggaran (Z).

**Tabel 4.6****Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,51842899
	Absolute	,140
Most Extreme Differences	Positive	,140
	Negative	-,131
Kolmogorov-Smirnov Z		1,168
Asymp. Sig. (2-tailed)		,131

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 4.6 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,131 lebih besar dari  $\alpha$  (0.05). Diambil keputusan terima  $H_0$  yang artinya persebaran variabel X1 dan X2 terhadap Z berdistribusi normal.

b. Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) dan Efektivitas Anggaran (Z) Terhadap Kinerja OPD (Y).

**Tabel 4.7****Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4,21767074
	Absolute	,121
Most Extreme Differences	Positive	,081
	Negative	-,121
Kolmogorov-Smirnov Z		1,009
Asymp. Sig. (2-tailed)		,260

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 4.7 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,260 lebih besar dari  $\alpha$  (0.05). Diambil keputusan terima  $H_0$  yang artinya persebaran variabel X1, X2 dan Z terhadap Y berdistribusi normal.

#### **4.1.2.4 Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kerelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan

variance inflation factor (VIF) yaitu jika nilai Tolerance  $> 0,100$  dan nilai VIF  $< 10,00$  menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

a. Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) Terhadap Efektivitas Anggaran (Z).

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
,177	5,645
,177	5,645

a. Dependent Variable: Z

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk nilai X1 dan X2  $0,177 > 0,100$  dan nilai VIF X1 dan X2  $5,645 < 10,00$  yang membuktikan bahwa variabel terbebas dari multikolinearitas.

b. Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) dan Efektivitas Anggaran (Z) Terhadap Kinerja OPD (Y).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
,156	6,407
,115	8,680
,132	7,557

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada X1 (0,156), X2 (0,155) dan Z (0,538) jadi dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance  $> 0,100$  dan nilai VIF pada X1 (6,407), X2 (8,680) dan Z (7,557) jadi dapat disimpulkan bahwa nilai VIF  $< 1,00$  yang membuktikan bahwa variabel terbebas dari multikolinearitas.

#### 4.1.2.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan regresi berganda (multiple regression) karena meneliti lebih dari satu variabel independen. Persamaan linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik T mempunyai nilai signifikansi  $\alpha : 5\%$ . Kriteria

penguji hipotesis adalah jika nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value)  $< 0,005$ , maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2011).

**Tabel 4.10**  
**Uji Statistik T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,001	2,392		,419	,677
	Akuntabilitas	,712	,118	,656	6,059	,000
	Transparansi	,281	,114	,268	2,471	,016

a. Dependent Variable: Kinerja OPD

Dari hasil penelitian diketahui nilai variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 6,059. Nilai  $t_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan jumlah  $n = 70$ . Berdasarkan tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n-2$ . diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 3,132. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap kinerja OPD (Y) adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 6,059 > t_{tabel} 3,132$  Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap kinerja opd (Y).

Dari hasil penelitian diketahui nilai variabel transparansi ( $X_2$ ) sebesar 2,471. Nilai  $t_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan jumlah  $n = 70$ . Berdasarkan tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n-2$ . diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar

3,132. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh transparansi ( $X_2$ ) terhadap kinerja opd (Y) adalah  $0,016 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 2,471 > t_{tabel} 3,132$ . Maka dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan transparansi ( $X_2$ ) terhadap kinerja opd (Y).

**Tabel 4.11**  
**Uji Statistik T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	-1,627	2,186		-,744	,460
1	Akuntabilitas	,703	,107	,626	6,538	,000
	Transparansi	,353	,104	,324	3,388	,001

a. Dependent Variable: Efektivitas Anggaran

Dari hasil penelitian diketahui nilai variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 6,538. Nilai  $t_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan jumlah  $n = 70$ . Berdasarkan tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n-2$ . diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 3,132. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap efektivitas anggaran (Z) adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 6,538 > t_{tabel} 3,132$ . Maka dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap efektivitas anggaran (Z).

Dari hasil penelitian diketahui nilai variabel transparansi ( $X_2$ ) sebesar 3,388. Nilai  $t_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan jumlah  $n = 70$ . Berdasarkan tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n-2$ . diperoleh

$t_{tabel}$  sebesar 3,132. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh transparansi ( $X_2$ ) terhadap efektivitas anggaran ( $Z$ ) adalah  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$   $3,388 > t_{tabel}$  3,132. Maka dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan transparansi ( $X_2$ ) terhadap efektivitas anggaran ( $Z$ ).

**Tabel 4.12**

**Uji Statistik T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,440	1,036		2,354	,021
	Efektivitas Anggaran	,944	,025	,976	37,334	,000

a. Dependent Variable: Kinerja OPD

Dari hasil penelitian diketahui nilai variabel efektivitas anggaran ( $Z$ ) sebesar 37,334. Nilai  $t_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan jumlah  $n = 70$ . Berdasarkan tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n-2$ . diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 3,132. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh efektivitas anggaran ( $Z$ ) terhadap efektivitas anggaran ( $Y$ ) adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$   $37,334 > t_{tabel}$  3,132. Maka dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan efektivitas anggaran ( $Z$ ) terhadap Kinerja OPD ( $Y$ ).



### **b. Uji Analisis Jalur (Analisis Path)**

Uji regresi dengan variabel intervening bertujuan untuk melihat pengaruh tidak langsung antara suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal atau sebab akibat) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Analisis jalur bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dihitung dari nilai *unstandardized coefficients* regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Akunt

#### **1) Pengaruh Langsung**

Pengaruh langsung Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Anggaran ditentukan sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung variabel Akuntabilitas (X1) terhadap variabel Efektivitas

Anggaran (Z) :

Akuntabilitas (X1)  $\longrightarrow$  Efektivitas Anggaran (Z) : 0,626

2. Pengaruh langsung variabel Transparansi (X2) terhadap variabel Efektivitas

Anggaran (Z) :

Transparansi (X2)  $\longrightarrow$  Efektivitas Anggaran (Z) : 0,324

Pengaruh langsung Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja OPD ditentukan sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung variabel Akuntabilitas (X1) terhadap variabel Kinerja OPD (Y) :

Akuntabilitas (X1)  $\longrightarrow$  Kinerja OPD (Y) : 0,656

2. Pengaruh langsung variabel Transparansi (X2) terhadap variabel Efektivitas Anggaran (Z) :

Transparansi (X2)  $\longrightarrow$  Kinerja OPD (Y) : 0,268

3. Pengaruh langsung variabel Efektivitas Anggaran (Z) terhadap variabel Kinerja OPD (Y) :

Efektivitas Anggaran (Z)  $\longrightarrow$  Kinerja OPD (Y) : 0,967

## 2) Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung variabel Akuntabilitas dan Transparansi Perpajakan terhadap Kinerja OPD ditentukan sebagai berikut :

1. Pengaruh tidak langsung variabel Akuntabilitas (X1) melalui Efektivitas Anggaran (Z) terhadap Kinerja OPD (Y):

Akuntabilitas (X1)  $\rightarrow$  Efektivitas Anggaran (Z)  $\rightarrow$  Kinerja OPD (Y) =  $0,626 \times 0,967 = 0,605342$

2. Pengaruh tidak langsung variabel Transparansi (X2) melalui Efektivitas Anggaran (Z) terhadap Kinerja OPD (Y):

Transparansi (X2) → Efektivitas Anggaran (Z) → Kinerja OPD (Y) = 0,324 x  
0,967 = 0,313308

### 3) Pengaruh Total

1. Pengaruh total variabel Akuntabilitas (X1) melalui Efektivitas Anggaran (Z) terhadap Kinerja OPD (Y):

Akuntabilitas (X1) → Efektivitas Anggaran (Z) → Kinerja OPD (Y) = 0,656  
x 0,605342 = 0,397104352

2. Pengaruh total variabel Transparansi (X2) melalui Efektivitas Anggaran (Z) terhadap Kinerja OPD (Y):

Transparansi (X2) → Efektivitas Anggaran (Z) → Kinerja OPD (Y) = 0,268  
x 0,313308 = 0,083966544

#### Gambar 4.1 Kerangka Model Analisis Jalur

Adapun pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat dari dekomposisi analisis jalur dibawah ini:

Hubungan Analisis Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
X1 → Y	0,656	0,605342	0,397104352
X2 → Y	0,268	0,313308	0,083966544
X1 → Z	0,626	-	0,626
X2 → Z	0,324	-	0,324
Z → Y	0,976	-	0,976

### C. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 4.13**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,898 <sup>a</sup>	,807	,801	3,10051

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Model Summary sebesar 0,807, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 80,7% sementara sisanya 19,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, nilai e1 dapat dicari dengan rumus  $e1 = \sqrt{1 - 0,807} = 0,4393$ .

**Tabel 4.14**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,982 <sup>a</sup>	,964	,963	1,39355

a. Predictors: (Constant), Y, X2, X1

b. Dependent Variable: Z

Model Summary sebesar 0,964, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z adalah sebesar 96,4% sementara sisanya 3,6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Sementara itu, nilai  $e1$  dapat dicari dengan rumus  $e1 = \sqrt{1 - 0,964} = 0,1897$  dengan demikian.

## 4.2. Pembahasan dan Hasil

### 1. $H_1$ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja OPD Pemerintahan

Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik pada Tabel 4.10 variabel Akuntabilitas memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas semakin meningkatnya maka akan meningkatkan Kinerja Opd.

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel X1 mempunyai pengaruh terhadap variabel Y, seperti hasil uji T Akuntabilitas (X1) mendapatkan nilai t hitung sebesar 6,059 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Kinerja OPD (Y), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa  $H_1$  dapat diterima, Penelitian ini sesuai dengan Suci Muthi'ah pada tahun 2019.

### 2. $H_2$ : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera

Utara

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik pada Tabel 4.10 variabel Transparansi memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi semakin meningkatnya maka akan meningkatkan Kinerja Opd.

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel X2 mempunyai pengaruh terhadap variabel Y, seperti hasil uji T Transparansi (X2) mendapatkan nilai t hitung sebesar 2,471 dan nilai signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Kinerja OPD (Y), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H2 dapat diterima, Penelitian ini sesuai dengan Suci Muthi'ah pada tahun 2019.

### 3. H<sub>3</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik pada Tabel 4.11 variabel Akuntabilitas memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas semakin meningkatnya maka akan meningkatkan Efektivitas Anggaran.

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel X1 mempunyai pengaruh terhadap variabel Z, seperti hasil uji T Akuntabilitas (X1) mendapatkan nilai t hitung sebesar 6,538 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Anggaran (Z), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H3 dapat diterima, Penelitian ini sesuai dengan Suci Muthi'ah pada tahun 2019.

### 4. H<sub>4</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik pada Tabel 4.11 variabel Transparansi memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi semakin meningkatnya maka akan meningkatkan Efektivitas Anggaran.

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel X2 mempunyai pengaruh terhadap variabel Z, seperti hasil uji T Transparansi (X2) mendapatkan nilai t hitung sebesar 3,388 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Anggaran (Z), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H4 dapat diterima, Penelitian ini sesuai dengan Suci Muthi'ah pada tahun 2019.

5. H<sub>5</sub>: Efektivitas Anggaran berpengaruh Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik pada Tabel 4.12 variabel Efektivitas Anggaran memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Anggaran semakin meningkatnya maka akan meningkatkan Kinerja Opd.

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel Efektivitas Anggaran berpengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel Z mempunyai pengaruh terhadap variabel Y, seperti hasil uji T Efektivitas Anggaran (Z) mendapatkan nilai t hitung sebesar 37,334 dan nilai signifikansi sebesar 0,000

lebih kecil dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel Efektivitas Anggaran (Z) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Kinerja OPD (Y) dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H5 dapat diterima, Penelitian ini sesuai dengan Suci Muthi'ah pada tahun 2019.

6. H<sub>6</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara sebagai variabel intervening

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik variabel Akuntabilitas memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas semakin meningkatnya maka akan meningkatkan Efektivitas Anggaran dan Kinerja Opd.

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa disebut variabel X1 menuju variabel Z dan Y, seperti hasil uji T Akuntabilitas (X1) menuju Efektivitas Anggaran dan Kinerja OPD =  $0,626 \times 0,967 = 0,605342$  bisa disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Anggaran (Z) dengan Kinerja OPD (Y), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H6 dapat diterima, Penelitian ini sesuai dengan Suci Muthi'ah pada tahun 2019.

7. H<sub>7</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran dengan Kinerja OPD Pemerintahan Sumatera Utara sebagai variabel intervening

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik variabel Transparansi memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas semakin meningkatnya maka akan meningkatkan Efektivitas Anggaran dan



### Kinerja Opd.

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan terhadap variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan yang ditimbulkan kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel X2 menuju variabel Z dan Y, seperti hasil uji T Transparansi (X2) Efektivitas Anggaran dan Kinerja OPD =  $0,324 \times 0,967 = 0,313380$ , bisa disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Anggaran (Z) dengan Kinerja OPD (Y), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H7 dapat diterima, Penelitian ini sesuai dengan Suci Muthi'ah pada tahun 2019.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja OPD . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan Kinerja OPD di Pemerintah Sumatera Utara.
2. Transparansi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja OPD. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa adanya transparansi dapat meningkatkan Kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara.
3. Akuntabilitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas anggaran. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan Akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas anggaran yang efektif .
4. Transparansi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa adanya Transparansi dapat meningkatkan Efektivitas Anggaran .
5. Efektivitas Anggaran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa adanya efektivitas anggaran dapat meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Sumatera Utara.

6. Akuntabilitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran dengan kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan Akuntabilitas dapat meningkatkan Efektivitas Anggaran dengan kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara.
7. Transparansi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran dengan kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa adanya Transparansi yang efektif dapat meningkatkan Efektivitas Anggaran dengan kinerja OPD Pemerintah Sumatera Utara.

## **5.2 Saran**

Dengan memperhatikan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dalam kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan saran-saran dengan harapan agar memiliki kebermanfaatan bagi banyak pihak. Saran yang bisa diberikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan pendampingan kepada responden pada saat mengisi kuesioner. Hal ini dilakukan agar jawaban yang diberikan tidak subjektif.
2. Guna untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya sektor publik, diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel yang berbeda dan menggunakan instansi yang lebih tinggi misalnya tingkat Negara.

## Daftar Pustaka

- Arja Sadjiarto. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 138–50.
- Adiwirya. M. F. I.P Sudana. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2), 611-628.
- Arifianti. H., Payamta., Sutaryo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi Xvi. Manado, 25-28 September 2013.
- Ardila, I. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 23-50.
- Alpi, M. Firza. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan* 1(1),355–64.
- Bastian, i. (2011). Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar. Jakarta: Erlangga
- Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–47.
- Dri Asmawanti S, Aisyah Mayang Sari, Vika Fitranita, and Indah Oktari Wijayanti. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94.
- Garung, Christa Yunnita, and Linda Lomi ga. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( add ) dalam pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Lucy Auditya, Husaini, and Lismawat. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*,3(1), 21–41.
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya, and I Putu Sudana. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.,2(11), 611–28.
- Mardiyati, and Wahyudi Hijrah. (2018). Penerapan Prinsip GCG (Transparansi & Akuntabilitas) Dalam Kerangka Laporan Keuangan Kelompok Pemodal 13 Di Pontianak Timur. *JurnalEkonomi STIEP* 3(2), 24–30.

- Nanik Ermawati, and Nurul Rizka Arumsari. (2020). Determinan Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus. *Akuntansi dan Manajemen*, 9(1), 63–84.
- Ramdhani, Dadan, and Indi Zaenur Anisa. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
- Rialdy, Novien, M. Firza Alpi, Nadia Ika Purnama, and Januri. (2021). Model Pengukuran Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan : Pendekatan Partial Least Squares (PLS) - SEM Analisis. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(02), 432–42. doi: 10.29040/jap.v21i02.1514.
- Suci Muthi'ah. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintah Kabupaten Magetan dan Ngawi.
- Ulum, I.(2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Wulandari, Ferida Ovy. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar)* Disusun.
- Yuyun Novita Sari. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)*.
- Yuwono. (2013). *Penganggaran Sektor Publik*. Bandung: BayuMedia Publishing.

## LAMPIRAN

**KUESIONER PENELITIAN "PENGARUH AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA DENGAN EFEKTIVITAS ANGGARAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH (OPD) PEMERINTAH SUMATERA UTARA"**

**PETUNJUK PENGISIAN**

1. Mohon kuesioner ini diisi oleh Bapak/ Ibu untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan.
2. Pada tipe pilihan, Bapak/ Ibu dipersilahkan untuk memberikan tanda (✓) pada kolom jawaban yang dianggap paling tepat.
  - STS (Sangat Tidak Setuju) : 1
  - TS (Tidak Setuju) : 2
  - N (Netral) : 3
  - S (Setuju) : 4
  - SS (Sangat Setuju) : 5
3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini tidak ada yang salah, oleh sebab itu usahakan tidak ada jawaban yang dikosongkan.
4. Saya ucapkan terimakasih pada Bapak/ Ibu atas partisipasi guna mensukseskan penelitian ini.

**DATA IDENTITAS RESPONDEN**

1. Jenis Kelamin: *(lingkarikodepilihananda)*
  - a. Pria
  - b. Wanita
2. Pendidikan terakhir: *(lingkarikodepilihananda)*
  - a. D3
  - b. Strata 1/S1
  - c. Strata 2/S2
  - d. Strata 3/S3
3. Usia : *(lingkari kode pilihan anda)*
  - a. 20-27 Tahun
  - b. 28-35 Tahun
  - c. 36-43 Tahun
  - d. Diatas 43 Tahun
4. Lama Bekerja *(lingkari kode pilihan anda)*
  - a. 1-3 Tahun
  - b. 4-6 Tahun
  - c. 7-9 Tahun
  - d. Diatas 10 Tahun



VARIABEL INDEPENDEN

I. Akuntabilitas

No.	Pernyataan	STS (Sangat Tidak setuju)	TS (Tidak setuju)	N (Netral)	S (Setuju)	SS (Sangat Setuju)
1	Tahapan pengelolaan anggaran disetiap OPD melibatkan semua unsur dalam OPD tersebut.				✓	
2	LAKIP digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas OPD untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.				✓	
3	OPD memiliki proses mengembangkan karyawan yang kompeten sesuai dengan kebijakan organisasinya.				✓	
4	Lakip merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.				✓	
5	OPD menginformasikan APBD yang diterima kepada masyarakat melalui media elektronik.		✓			
6	LAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.				✓	
7	Informasi anggaran yang disajikan, berisi informasi yang benar dan lengkap terkait sasaran dari suatu program.				✓	
8	OPD memiliki ketegasan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kerja karyawan.				✓	
9	Laporan pertanggungjawaban di OPD dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.		✓			
10	OPD mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.				✓	

## 2. Transparansi

No.	Pernyataan	STS (Sangat tidak setuju)	TS (Tidak setuju)	N (Netral)	S (Setuju)	SS (Sangat Setuju)
1	APBD diumumkan dan disajikan secara tepat jumlahnya kepada masyarakat.				✓	
2	Transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses.				✓	
3	Informasi tentang pengelolaan anggaran, mudah didapatkan oleh masyarakat.		✓			
4	LAKIP diumumkan melalui media elektronik.				✓	
5	Publik tidak bisa mengakses informasi mengenai pengelolaan anggaran.				✓	
6	Pelayanan masyarakat harus memberikan informasi secara transparan akan tetapi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.				✓	
7	Pada proses penyusunan anggaran, kebijakan anggaran di OPD selalu diumumkan secara terbuka.				✓	
8	Transparansi OPD terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.				✓	
9	Sistem pemberian informasi di OPD dapat dan mudah diakses oleh masyarakat dengan terbuka.				✓	
10	OPD mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.				✓	

VARIABEL INTERVENING

1. Efektivitas Anggaran

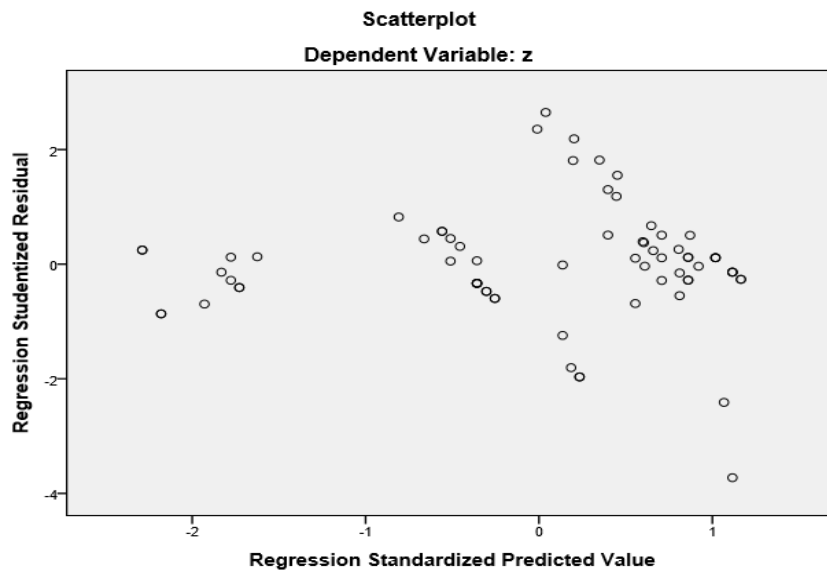
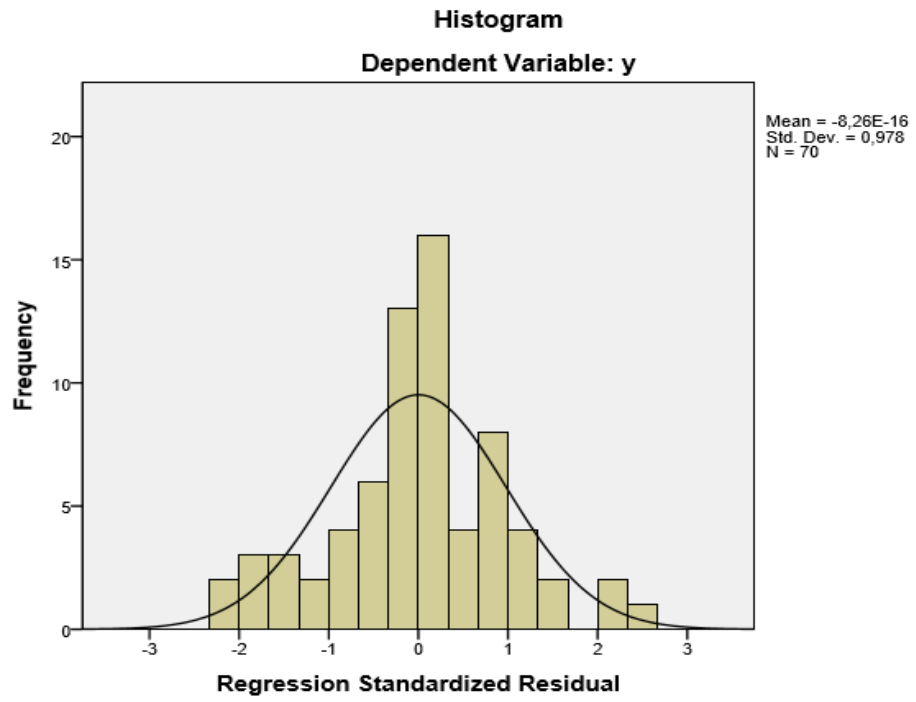
No.	Pernyataan	STS (Sangat tidak setuju)	TS (Tidak setuju)	N (Netral)	S (Setuju)	SS (Sangat setuju)
1	Setiap unit mempunyai kecakapan dalam melaksanakan kegiatan.				✓	
2	Pengalokasian dana untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.				✓	
3	Semua program yang ditargetkan, dapat tercapai sesuai dengan visi misi.				✓	
4	Setiap kegiatan atau aktivitas dilakukan berdasarkan rencana strategi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.				✓	
5	Anggaran yang dikelola berdampak kepada kepuasan pelayanan masyarakat.				✓	
6	Program yang ditargetkan menyimpang dari visidan misi yang telah ditetapkan.		✓			
7	Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur.				✓	
8	Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur Yang berlaku.				✓	
9	Anggaran belanja di OPD yang telah tersusun secara logis yaitu adanya input, output, hasil dan capaian program.				✓	
10	Anggaran di OPD kami merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.		✓			



## VARIABELDEPENDEN

### 1. Kinerja OPD

No.	Pernyataan	STS (Sangat tidaks etuju)	TS (Tidak setuju)	N (Netral)	S (Setuju)	SS (Sangat Setuju)
1	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros.					✓
2	Setiap kegiatan, program, dan kebijakan dilakuka evaluasi dengan menilai efisiensi biaya.				✓	
3	Setiap kegiatan, program, dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.				✓	
4	Pelaksanaan kegiatan telah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.		✓			
5	OPD mempertahankan karyawan yang kompeten.					✓
6	OPD memiliki ketegasan mengenai tolak ukur kinerja untuk mendorong akuntabilitas kerja karyawan.				✓	
7	OPD mampu mengidentifikasi perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.				✓	
8	OPD memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mencerminkan wewenang untuk pencapaian tujuan organisasinya.				✓	
9	Indikator kinerja untuk setiap kegiatan tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan teratur.				✓	
10	Pegawai OPD bersikap dan berperilaku ramah/baik dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna layanan.				✓	





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Makmur Rassi No. 3, Medan, Telp. 061-4624567, Kode Pos 20218

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2118/IDU/SKR/AKT-FEB/UMSU/2021/2021

Nama Mahasiswa : ARINDA HASANAH  
NPM : 1709170263  
Program Studi : Akuntansi  
Konentrasi : SEKTOR PUBLIK  
Tanggal Pengajuan Judul : 20/2/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : M. Firza Alpi, SE, M.Si (25 Februari 2021)

Judul Disetujui\*\*)

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi  
Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas  
Anggaran sebagai Variabel Intervening Pada  
OPD Pemerintahan Sumatera Utara

Dibuktikan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

Medan, 8 Juni 2021

Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

M. Firza ALPI, SE, M.Si

Keterangan

\*) Ditulis oleh Pengajar Program Studi

\*\*) Ditulis oleh Dosen Pembimbing

Ditandatangani oleh Ketua dan Dosen pembimbing sesuai dengan persyaratan terdapat dalam formulir pengajuan judul penelitian



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1290/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 04 Mei 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Arinda Hasanah  
N P M : 1705170263  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **M. Firza Alpi, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 Juni 2022**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Dzulqaidah 1442 H  
16 Juni 2021 M



  
Dekan  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**

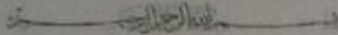
Tembusan :  
1. Peringgal.



**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, .....II  
.....20...M

Kepada Yth.  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

A	R	I	N	D	A	H	A	S	A	N	A	H						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

NPM : 

1	7	0	5	1	7	0	2	6	3								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N		0	2		A	P	R	I	L		1	9	9	9
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Program Studi : Akuntansi /  
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : 

J	L	.	K	.	L	.	Y	O	S	.	S	U	D	A	R	S	O	
L	K	.	I	V	.	M	A	B	A	R								

Tempat Penelitian : 

B	A	D	A	N	P	E	R	E	N	C	A	N	A	N	D	A		
N	P	E	M	B	A	N	G	U	N	A	N	D	A	E	R	A	H	
B	A	P	P	E	D	A	P	R	O	V	I	N	S	I	S	U	M	
A	T	E	R	A	U	T	A	R	A									

Alamat Penelitian : 

J	L	.	P	A	N	G	E	R	A	N	D	I	P	O	N	E	G	O
R	O	N	O	.	2	1	A	,	M	A	D	R	A	S	H	U	L	
U	,	K	E	C	.	M	E	D	A	N	P	O	L	O	N	I	A	
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA																		

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SPAGAH, SE. M.Si)

Wassalam  
Pemohon

(ARINDA HASANAH)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1288/II.3-AU/UMSU-05/F/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 05 Dzulqaidah 1442 H  
16 Juni 2021 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara**  
Jln. Pangeran Diponegoro No 21A Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Arinda Hasanah  
Npm : 1705170263  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
Dekan  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
1. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 21 A Telp. (061) 4538045, 4571306, Fax (061) 4513830  
E-mail : bapedasu@indosat.net.id ; Homepage : <http://www.bappedasumut.go.id/>

MEDAN - 20152 PO BOX - 1054

Medan, 24 Juni 2021

Nomor : 423.4/1040/BPSU/1/2021  
Sifat :  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,  
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Univ. Muhammadiyah  
Sumatera Utara

di-  
Medan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1288/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Izin Riset, yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Arinda Hasanah  
Nim : 1705170263  
Prog. Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Akutabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa tersebut melaksanakan Riset dan pengambilan data di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dengan persyaratan yaitu :

1. Hasil Riset disampaikan 1 (satu) eksemplar ke Bappeda Provsu;
2. Tidak memanfaatkan data untuk kepentingan diluar dari Program Studi;
3. Mematuhi Protokol Kesehatan dan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH



YOSI SUKMONO, ST  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19770628 200502 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Para Kepala Bidang dilingkungan Bappeda Provsu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Peringgal.



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Arinda Hasanah  
Npm : 1705170263  
Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Sektor Publik  
Judul Penelitian : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Variabel Intervening Pada Opd Pemerintahan Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Letak belakang nama - nama - pada	8/6/2021	
Bab 2	Konsep pustaka pembungaran & heos	8/6/2021	
Bab 3	Metodologi	8/6/2021	
Daftar Pustaka	Mendek	8/6/2021	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Kuesioner	8/6/2021	
Persetujuan Seminar Proposal	See Seminar	8/6/2021	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Mei 2021

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

(M. Firza Alpi, Se, M.Si)





**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini **Rabu, 28 Juli 2021** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : **Arinda Hasanah**  
NPM. : 1705170263  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 02 April 1999  
Alamat Rumah : Jln. K.L Yos Sudarso Lk IV Mabar  
Judul Proposal : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Judul di Sumut tp data kota medan. Aceh ?
Bab I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada latar belakang tidak perlu menjabarkan struktur organisasi OPD (itu dijelaskan di bab 2 saja)</li><li>- kutipan sekdaprov tsb tidak bisa digunakan selama tidak sumber referensinya darimana (apa surat kabar atau berita online dll)</li><li>- Tabel 1.1. itu tidak perlu yang diperlukan penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu secara naratif biarkan tabel disajikan di bab 2. Penelitian terdahulu harus lebih dari 1</li><li>- Penelitian terdahulu yg menggunakan variabel intervening (efektivitas anggaran) harus disajikan (kalo gak ada gak usah dipaksakan mana tau sebagai variabel independen atau variabel moderating)</li><li>- Latar belakang harus mennjelaskan fenomena yg mewajibkan efektivitas anggaran sebagai variabel intervening.</li><li>- mengapa identifikasi masalah tidak menyinggung efektivitas anggaran sebagai variabel intervening</li><li>- kalo batasan masalah sudah dijelaskan di judul berarti tdiak perlu dijelaskan di batasan masalah kecuali tdiak semua OPD yg mau diteliti maka perlu dijelaskan sebagai batasan masalah</li></ul>
Bab II	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada bab 2 teori yg pertama dijelaskan teori-teori tentag variabel dependen (Kinerja OPD)</li><li>- Penelitian terdahulu itu bagian dari uraian teori bukan setelah hipotesis</li><li>- Kerangka konseptual dijelaskan dalam sub bab sesuai hipotesis yg akan diajukan berisi dukungan penelitia-penelitian terdahulu atas variabel-variabel yang akan diuji</li></ul>

	- Pernyataan dan jumlah hipotesis relevankan dengan rumusan masalah
III	- Pada definisi operasional harus dijelaskan kuesioner berasal dari penelitian siapa ? tidak boleh buat baru karena sdh ada penelitian terdahulunya - judulnya di sumut datanya kok medan - penentuan jumlah sampel harus menggunakan rumus karena jumlah populasi diketahui dengan pasti (probability sampling) gak bisa ditetapka sesuka hati peneliti - Teknik analisis data = metode analisis data === di dalamnya jelaskan pake software apa gak mungkin manual - Peneliti menguasai apa tidak ttg path analysis ? kalo menguasai jelaskan tahapan-tahapan path analysis
lainnya	- Daftar pustaka dibuat berurut alfabetikal (A ke Z) dan semua yg dikutip wajib disajikan di daftar pustaka - Minimum artikel 3 dosen akuntansi umsu termasuk milik pembimbing yg relevan dgn topik wajib dikutip dalam proposal ini dan disajikan di daftar pustaka
kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 28 Juli 2021

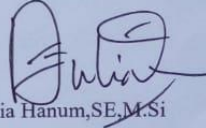
TIM SEMINAR

Ketua



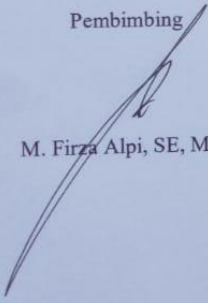
Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris




Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing



M. Firza Alpi, SE, M.Si

Pemanding



Sukma Lesmana, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 28 Juli 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Arinda Hasanah  
NPM : 1705170263  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 02 April 1999  
Alamat Rumah : Jln. K.L Yos Sudarso Lk IV Mabar  
Judul Proposal : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Dengan Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *M. Firza Alpi, SE, M.Si.*

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

M. Firza Alpi, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



## PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan : 13 Oktober 2020.

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di  
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ARINDA HASANAH  
N P M : 1705170263  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jl. K.L. Yos Sudarso Lt IV  
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja dengan Efektivitas Anggaran sebagai Variabel Intervening Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara.

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP seukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam  
Pemohon

ARINDA HASANAH

Disetujui oleh  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor I

Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Dekan

H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2561/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021      Medan, 07 Robi'ul Awwal 1443 H  
Lamp. : -      14 Oktober 2021 M  
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) Provinsi Sumatera Utara**  
Jln. Pangeran Diponegoro No. 21A, Madras Kec. Medan Polonia Kota Medan Sumatera Utara  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Arinda Hasanah  
N P M : 1705170263  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja dengan Efektivitas Anggaran sebagai variabel intervening pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan  
H. Januri, SE., MM., M.Si

C.c.File